

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2007. *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga Cetakan Ke-8*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ahmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum Edisi Pertama*. Kencana, Jakarta.

Ahmad Hasan. 2005. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hakim Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan 8*. Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia*. Salemba Empat, Jakarta.

Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi Cetakan Ke-6*. Kencana, Jakarta.

Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati. 2010. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Malayu S.P Hasibuan. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara, Jakarta.

M. H. Fajar Nurdewata. 2010. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soekanto. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap salah-Masalah Sosial*. Alumni, Bandung.



Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Victor Imanuel W Nalle. 2013. *Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*. Setara Press (Kelompok Intrans Publishing), Jatim.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).

C. Lain-Lain

Ditulis dari <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jft/article/download/2478/30> diakses pada tanggal 28-02-2018.



Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8304/f.%20BAB%20II%20PDF.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 20-03-2018.

Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 02-03-2018.

Diakses dari <http://erepo.unud.ac.id/11207/3/bb43a90d9f489482a0f42561bf957778.pdf> pada tanggal 02-03-2018.

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran pada tanggal 20-03-2018.

Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/pages/default.aspx> pada tanggal 01-04-2018.

Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/02/02/13113921/e-toldiberlakukan-antrean-kendaraan-di-pintu-tol-makassar-capai-1-km> pada tanggal 01-04-2018.

Diakses dari <http://www.nontunai.com/pengertian-sistem-pembayaran-non-tunai/> pada tanggal 19-04-2018.

Diakses dari www.margautamanusantara.com pada tanggal 15-09-2018.

